DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmadja, I Dewa Gede, & I Nyoman Putu Budiartha, *Teori-Teori Hukum*, (Malang: Setara Press, 2018).

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022).

Butarbutar, Russel, *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional* (Bekasi: Gramata Publishing, 2017).

Frank, Robert, Ben Bernanke, *Principles of Economics Macro*, 2nd ed. (New York: McGraw-Hill/Irwin, 2001).

Hidayah, Khoirul, *Pokok-Pokok Hukum Pajak*, (Malang: Setara Press, 2020).

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020).

Isjwara, F., *Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Binacipta, 1982).

Mahfud, Afif, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024).

Mankiw, N. Gregory, *Teori Makroekonomi Edisi Kelima*, Terj. Imam Nurmawan (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003).

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis*, 3rd ed. (United States of America: SAGE Publications, 2014).

Mochtar, Zainal Arifin & Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Depok: Rajawali Pers Depok, 2021).

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Adita Bakti, 2004).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982).

Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2013).

Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018).

Jurnal

Adiyanta, F. C. Susila, "Fleksibilitas Pajak sebagai Instrumen Kebijaksanaan Fiskal untuk Mengantisipasi Krisis Ekonomi sebagai Akibat Dampak Pandemi Covid-19", *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 1, (Maret 2020): 176, https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.162-181.

Aji, Bahrian Kuncoro, Haptari, Vissia Dewi, "Dampak Kebijakan Insentif PPN DTP Rumah Terhadap Profibilitas Perusahaan Sektor Real Estat", *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 2. (2022,), https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1732.

Jayantiari, I Gusti Agung Mas Rwa, Kadek Agus Sudiarawan, dan Tjok Istri Diah Widyantari Pranya Dewi, "Pembangunan Hukum Berorientasi Keadilan Melalui Harmonisasi Hukum Negara dan Hukum Adat", *Jurnal Majelis: Eksistensi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia* 2, (Agustus 2020): 154, https://mpr.go.id/jurnal/239/Jurnal-Majelis-Ed-2-2020:-Eksistensi-Hukum-Adat-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.

Juliani, Henny, "Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020", *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 2, (Juni 2020): 331, https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.329-348.

Juliani, Henny, "Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19", *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 4, (November 2020): 598, https://doi.org/10.14710/alj.v3i4.595%20%20%20-%20516.

Samekto, FX. Adji, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen tentang Stufenbeautheorie dalam Pendekatan Normatif Filosofis", *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1, (April 2019): 1, https://doi.org/10.14710/hp.7.1.1-19.

Sakti, Luxy Pujo, Tri Sulistaningsih, Tutik Sulistyowati, "Perubahan Sosial Masyarakat Pasca Pandemi COVID-19 di Kota Malang", *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 6, no. 2 (Oktober 2021): 217, DOI: 10.25077/jakp.

Tarmidi, Deden, Achmad, Rhona Hafidz Dzafron, 2022, “Analisis Implementasi Insentif Pajak Terkait Covid-19 Rumah Sakit”, *Media Akuntansi Perpajakan* 7, no. 2. (2022), https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6625.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Permukiman dan Kawasan Pemukiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2025 tentang Insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Satuan Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.

Artikel Internet

Advokai, “Pengertian dan Ciri-Ciri Negara Hukum Menurut UUD 1945”, diakses pada 2 Februari 2026, kai.or.id.

Aesia, “Apa itu Real Estate? Ini Dia Pengertian dan Jenis-Jenisnya”, diakses pada 8 Maret 2026, aesia.kemenkeu.go.id.

Arghajata, “Faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran”, diakses pada 3 Februari 2026, arghajata.com.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2024”, diakses pada 20 Desember 2025, semarangkota.bps.go.id.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2020”, diakses pada 23 September 2025, semarangkota.bps.go.id.

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, “Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Semarang, 2023”, diakses pada 23 September 2025, semarangkota.bps.go.id.

Bank Indonesia, “Survei Harga Properti Residensial Triwulan IV 2025: Harga Properti Residensial Tumbuh Terbatas”, diakses pada 24 April 2026, bi.go.id

Bisnis Semarang, “Pengembang Perumahan Komersil di Jateng Putar Otak Hadapi Pelemahan Daya Beli”, diakses pada 23 September 2025, semarang.bisnis.com.

CNBC Indonesia, “Video: PPN 0% Rumah Lanjut 2026: Siapa Diuntungkan?”, diakses pada 9 Februari 2026, cnbcindonesia.com.

Databooks, “6 Sektor Usaha Paling Terdampak saat Pandemi Corona”, diakses pada 3 Februari 2026, databoks.katadata.co.id.

DDTC News, “Ada Insentif Pajak, Anak Muda di Negara Ini Ramai Beli Rumah”, diakses pada 19 Februari 2026, news.ddtc.co.id.

DDTCNews, “Kabar Gembira! Insentif PPN Rumah DTP Diadakan Lagi untuk Tahun ini”, diakses pada 20 Februari 2026, news.ddtc.co.id.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Pandemi Covid-19 dan Menurunnya Perekonomian Indonesia”, diakses pada 3 Februari 2026, djkn.kemenkeu.go.id.

Direktorat Jenderal Pajak, “Enam Insentif Pajak Diperpanjang Sampai 2021, Ini Penjelasannya”, diakses pada 4 Ferbuari 2026, pajak.go.id.

Direktorat Jenderal Pajak, “Kode Transaksi Faktur Pajak, Kenali Jenis dan Saat Penggunaannya”, diakses pada 25 Maret 2026, pajak.go.id.

Direktorat Jenderal Pajak, “Mengenal Insentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19”, diakses pada 3 Februari 2026, pajak.go.id.

Direktorat Jenderal Pajak, “Pemerintah Perpanjang Insentif PPN Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun”, diakses pada 21 September 2025, pajak.go.id.

Direktorat Jenderal Pajak, “Peran Insentif Pajak Sektor Properti”, diakses pada 21 September 2025, pajak.go.id.

Direktorat Jenderal Pajak, “Perpanjangan Insentif PPN Sektor Perumahan”, diakses pada 10 Februari 2026, pajak.go.id.

Direktoral Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, “Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”, diakses pada 22 Desember 2025, fiskal.kemenkeu.go.id.

DPRKPP Surabaya, “Standart Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan”, diakses pada 4 Februari 2026, dprkpp.surabaya.go.id.

HukumOnline, “Kriteria Rumah Bersubsidi yang Bebas dari PPN”, diakses pada 29 Desember 2025, hukumonline.com.

Jaya Metro, “Welcome to JayaMetro”, diakses pada 27 Maret 2026, jayametro.com.

JDIH Kementerian Keuangan, “149/PMK.03/2021”, diakses pada 4 Februari 2026, jdih.kemenkeu.go.id.

Kementerian Keuangan, 2025, “Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif”, diakses pada 1 Oktober 2025, kemenkeu.go.id.

Kementerian Keuangan, “Realisasi Sementara APBN 2025”, diakses pada 4 April 2026 media.kemenkeu.go.id.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Menko Airlangga: Indonesia Telah Menjadi Tujuan Investasi Properti Terbaik di Dunia”, diakses pada 2 Februari 2026, ekon.go.id.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, “Kementerian PUPR: REI Miliki Peran Besar Dalam Pembangunan Rumah di Indonesia”, diakses pada 4 Februari 2026, pkp.go.id].

Localise SDGs Indonesia, “Sustainable Development Goals”, diakses pada 27 Desember 2025, localisesdgs-indonesia.org.

Media Indonesia, “Pengertian Equilibrium dalam Teori Ekonomi Permintaan dan Penawaran”, diakses pada 3 Februari 2026, mediaindonesia.com.

MetroTV, “Indonesia Property Forum 2025: Optimisme Industri Properti Jadi Penggerak Ekonomi Nasional”, diakses pada 2 Februari 2026, metrotvnews.com.

Nasly, Sekar, “Tren Insentif Pajak Properti Indonesia dan Negara Lain di Asia”, Pajakku, diakses pada 19 Februari 2026, artikel.pajakku.com.

Nasution, Olivia Barcelona, “Hirarki Kebutuhan Maslow”, STIE YKPN, diakses pada 30 Januari 2026, stieykpn.ac.id.

Nur Science Institute, “Teori Pengeluaran Pemerintah: Perspektif Para Ahli”, diakses pada 1 Februari 2026, nurscienceinstitute.id.

Pajakku, “PMK Insentif PPN Rumah DTP Berlaku Mulai November”, diakses pada 4 Februari 2026, artikel.pajakku.com.

Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, diakses pada 3 Februari 2026, pusatkrisis.kemkes.go.id.

Sikumbang, diakses pada 27 Desember 2025, sikumbang.tapera.go.id.

SIP Law Firm, “Mau Beli Rumah Bebas Pajak? Simak Ketentuan PPN DTP 100% Menurut PMK 60/2025!”, diakses pada 29 Desember 2025, siplawfirm.id.

SIPLawFirm, “Pengertian Properti, Karakteristik dan Sumber Hukumnya”, diakses pada 29 Januari 2026, siplawfirm.id.

Tempo, “2 Tahun Pandemi Covid-19, Ringkasan Perjalanan Wabah Corona di Indonesia”, diakses pada 3 Februari 2026, tempo.co.

Tempo, “Penjualan Rumah Tapak Mulai dari Rp600 Juta Laris pada 2025”, diakses pada 24 April 2026, tempo.co.

The Global Goals, “Jadikan Kota dan Permukiman Manusia yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan”, diakses pada 9 Oktober 2025, globalgoals.org.

Universitas Gajah Mada, “Jumlah Kelas Menengah RI Turun Minimnya Ketersediaan Lapangan Pekerjaan”, diakses pada 6 April 2026, ugm.ac.id.

World Bank Group, “Laporan Kelompok Bank Dunia Mengusulkan Kebijakan dan Investasi Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan dan Aksi Iklim Indonesia”, diakses pada 3 Februari 2026, worldbank.org.

Yulius, Yongky, “Mengenal Surat Pemesanan Rumah (SPR): Fungsi, Contoh & Tips Penting”, Rumah123, diakses pada 16 April 2026, rumah123.com

Kamus

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring”, diakses pada 11 Maret 2026, kbbi.kemendikdasmen.go.id.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring”, diakses pada 9 Maret 2026, kbbi.kemendikdasmen.go.id.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI VI Daring”, diakses pada 11 Maret 2026, kbbi.kemendikdasmen.go.id.

Garner, Bryan A., *Black's Law Dictionary 11th Edition*, (United States: Thomson Reuters, 2019).